



Warga membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) di fasilitas layanan pembayaran PBB yang dibuka Pemkot Jogja berbasis RW, Rabu (14/9).

► PEMASUKAN DAERAH

Realisasi PBB Jogja Baru 59%

UMBULHARJO—Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pemkot Jogja baru sekitar 59% dari total target sebesar Rp97 miliar tahun ini. Padahal jatuh tempo pembayaran PBB ditetapkan pada 30 September mendatang.

Yusef Leon
yusef@harianjogja.com

Untuk itu, Pemkot berupaya menjemput bola kepada wajib pajak dengan membuka layanan di tingkat akar rumput. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jogja, Aman Yuriadijaya mengatakan, selain memperbanyak loket pembayaran via digital, pihaknya juga membuka layanan pembayaran pajak ke

► Pemkot berupaya menjemput bola kepada wajib pajak dengan membuka layanan di tingkat akar rumput.

► Pemkot Jogja juga membuka layanan pembayaran PBB di asrama mahasiswa Kepulauan Riau dan Balai RW 06 Pandeyan Umbulharjo.

wilayah untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak. Menurut dia, upaya ini cukup efektif karena banyak warga yang antusias membayar PBB dengan didatangi langsung. "Dari dua lokasi yang kami pantau, undangan yang hadir rata-rata hampir 100 persen," kata Aman, Rabu (14/9). Pada kesempatan itu, Pemkot Jogja

membuka layanan pembayaran PBB di dua tempat yakni asrama mahasiswa Kepulauan Riau, Umbulharjo dan Balai RW 06 Pandeyan Umbulharjo.

Menurut Aman, Pemkot Jogja sengaja membuka layanan sampai ke wilayah lantaran realisasi PBB baru mencapai 59% dari target. Ada kebiasaan, wajib pajak membayar PBB-nya mendekati waktu jatuh tempo.

"Padahal layanan kami sudah banyak pilihan misalnya di kompleks Mal Pelayanan Publik [MPP], Kantor Pos, dan perbankan seperti BPD DIY, BNI, BRI, dan Bank Jogja. Layanan pembayaran PBB secara digital juga disediakan melalui aplikasi dompet digital seperti Gopay dan Tokopedia," ungkap dia.

Optimalisasi Pembayaran
 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja, Wasesa menyebut, tahun ini jawatannya menerbitkan sebanyak 95.660 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB.

Untuk mengoptimalkan pembayaran, secara bertahap layanan di tingkat RW akan dibuka. Tujuannya untuk mendekatkan masyarakat dalam mengakses layanan pembayaran pajak. "Kami ingin menghindari wajib pajak bayar setelah jatuh tempo karena akan ada denda dua persen per bulan dengan maksimal 48 persen," katanya.

Wajib pajak juga bisa mengecek tunggakan PBB lewat aplikasi *Jogja Smart Service* (JSS) dan diharapkan segera membayar. Dengan berbagai kemudahan layanan itu pihaknya berharap masyarakat punya kesadaran dan ketepatan dalam pembayaran pajak kepada pemerintah.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005